

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai strategi yang diterapkan di BPBD Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan kekeringan. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti maka informan yang dipilih yaitu :

1. Informan Formal

Berikut adalah identitas informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini :

Bapak M. Saleh (Informan 1) adalah Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang telah menjabat selama kurang lebih 29 tahun. Pak Saleh sering ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPBD Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan di BPBD Kota Bandar Lampung tanggal 23 Maret 2015 dan dilanjutkan tanggal 2 Mei 2015, informan yang berusia 56 tahun ini bergelar Sarjana Sosial, beliau memiliki motivasi besar dalam membantu korban bencana. Beliau termasuk individu tergolong terbuka dan demokratis dalam menyampaikan informasi yang beliau ketahui mengenai penanggulangan bencana.

Bapak Syamsul Rahman (Informan 2), meskipun beliau terbilang baru yakni 4 bulan, berada di BPBD Kota Bandar Lampung, namun beliau sudah cukup memahami tentang strategi yang dijalankan BPBD Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Wawancara dengan beliau dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015 dan dilanjutkan tanggal 2 Mei 2015. Pak Syamsul Rahman merupakan individu yang ramah, tegas, dan demokratis. Sebelum ditempatkan di BPBD Kota Bandar Lampung, beliau lebih dulu ditugaskan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Beliau merupakan lulusan Magister Teknik.

Bapak Sutarno (Informan 3), merupakan orang yang juga lumayan lama di BPBD. Beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan pangkat golongan III-d. Bapak berusia 50 tahun ini merupakan individu yang ramah dan kritis. Beliau merupakan lulusan Magister Manajemen yang mengabdikan diri kepada negara dengan sebaik-baiknya. Wawancara dilakukan dengan Bapak yang berambut cepak ini pada tanggal 23 Maret 2015 dan dilanjutkan 2 Mei 2015.

2. Informan Pendukung

Penggunaan informan pendukung dimaksudkan untuk mendukung data yang telah diperoleh dari informan formal sehingga dapat diperoleh data bagaimana masyarakat sebagai target dari strategi, menilai strategi yang dijalankan oleh BPBD Kota Bandar Lampung. Informan pendukung dalam penelitian ini merupakan target dari strategi yang dijalankan yaitu masyarakat di Kecamatan

Sukabumi Bandar Lampung. Pemilihan informan dilakukan secara *random*, informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami kekeringan yang penulis wawancarai di masing-masing kelurahan pada tanggal 4 Mei 2015 dan selanjutnya bersedia diwawancara terkait penelitian.

Berikut adalah identitas informan yang dipilih penulis dalam penelitian ini :

1. Erawati (46 tahun) Warga Kelurahan Sukabumi
2. Enawati (42 tahun) Warga Kelurahan Sukabumi Indah
3. Yusmala (40 tahun) Warga Kelurahan Campang Raya
4. Sriyati (30 tahun) Warga Kelurahan Campang Jaya
5. Darmayanto (63 tahun) Warga Kelurahan Nusantara Indah

B. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana rencana strategi yang digunakan BPBD Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana kekeringan. Rencana strategi tersebut menyangkut pola yang diterapkan BPBD dalam penanggulangan kekeringan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab empat, rencana strategi yang diterapkan BPBD Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kekeringan adalah melakukan pengeboran ke daerah atau titik wilayah kekeringan, sosialisasi kepada masyarakat untuk membuat sumur biopori di rumah tinggal masing-masing dan membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan mengadakan distribusi air ke wilayah yang mengalami kekeringan. Berikut hasil wawancara dengan informan yang berhasil peneliti simpulkan :

1. Prediksi (*prediction*) : dalam fase ini, dilakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural. Berikut pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan :

a) Apakah BPBD memberikan peringatan dini pada saat awal terjadi kekeringan?

Informan 1 :

“Di dalam sosialisasi memberikan peringatan dini, biasanya tidak ada kegiatan khusus, yang dilakukan hanya berupa pemberian informasi tentang tata cara menanggulangi kekeringan, serta kiat-kiat yang dilakukan apabila menghadapi kekeringan” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 2 :

“Tidak ada kegiatan khusus untuk pemberian peringatan dini. Karena petugas BPBD sendiri ada yang tidak mengerti sistem penanggulangan bencana, khususnya kekeringan” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 3 :

“Kekeringan yang terjadi di wilayah Sukabumi sendiri tidak bisa di prediksi, sehingga BPBD tidak setiap waktu memberikan peringatan saat-saat awal terjadi kekeringan” (Wawancara 2 Mei 2015)

Analisis Penulis :

Menurut hasil wawancara, tidak ada kegiatan khusus dalam memberikan peringatan dini ke masyarakat apabila terjadi kekeringan. Kurangnya pengetahuan yang menyangkut tentang penanggulangan tersebutlah yang menyebabkan BPBD

kekurangan tenaga yang berkualitas dibidang penanggulangan bencana untuk menyampaikan peringatan dini, serta kurangnya pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kekeringan. Di dalam fase prediksi ini seharusnya BPBD Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural, misalnya langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana kekeringan, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan langkah yang harus diambil dalam menghadapi kekeringan. Sedangkan langkah non-struktural yang seharusnya dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung adalah berupa tindakan pada saat awal terjadinya bencana kekeringan untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak bahaya kekeringan, misalnya krisis akan bersih, sehingga apabila masyarakat di Kecamatan Sukabumi diberikan peringatan dini yang efektif dan tepat waktu sebelum memasuki musim kemarau atau kekeringan terjadi mungkin masyarakat bisa menyiapkan langkah yang tepat. Sedangkan dari hasil observasi menunjukkan bahwa BPBD sendiri kurang memerhatikan soal kegiatan pemberian peringatan dini dan terkesan kurang memprioritaskan masyarakat yang mengalami bencana kekeringan. Padahal salah satu kegiatan dari strategi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam menyampaikan informasi tentang menghadapi kekeringan, sehingga diharapkan dalam menyampaikan informasi dapat memberikan kesiapan bagi semua pihak dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana kekeringan di masa yang akan datang.

b) Bagaimanakah cara BPBD memberikan informasi kepada masyarakat?

Maka jawaban dari informan adalah :

Informan 1 :

“BPBD memberikan informasi tentang tata cara menanggulangi kekeringan, serta kiat-kiat yang dilakukan apabila menghadapi kekeringan saat meninjau ke lokasi kekeringan atau saat mendistribusikan air” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 2 :

“Saat memberikan bantuan air ke masyarakat yang mengalami kekeringan, petugas BPBD memberikan informasi tentang cara menggunakan fasilitas air bersih yang diberikan oleh BPBD, misalnya petugas BPBD sendiri yang langsung mensosialisasikan ke masyarakat” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 3 :

“Masyarakat lebih memahami kondisi fisik dan BPBD hanya mengarahkan kiat-kiat apa saja yang dilakukan apabila musim kemarau tiba dan bagaimana menghadapi kekeringan” (Wawancara 2 Mei 2015)

Analisis Penulis :

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemberian peringatan dini adalah berupa pemberian informasi tata cara menanggulangi kekeringan yang disertai dengan kiat-kiat yang dilakukan apabila terjadi kekeringan di lingkungannya. Cara pemberian informasi ini

merupakan pendukung dalam pelaksanaan strategi BPBD Kota Bandar Lampung, pada pemberian informasi tata cara menanggulangi kekeringan berisikan pesan tentang cara yang dilakukan pada saat kekeringan, serta cara mengurangi dampak kekeringan. Sedangkan pemberian kiat-kiat yang dilakukan apabila terjadi kekeringan berisikan tentang apa yang harus dilakukan sebelum atau pada saat kekeringan. Informasi yang diberikan oleh BPBD Kota Bandar Lampung masih sesuai dengan standarisasi dari pusat. Kegiatan ini sangat penting, karena dapat meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam mempersiapkan atau secara tidak langsung akan meminimalisir dampak dari bencana kekeringan, dengan adanya kegiatan ini BPBD bisa melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana kekeringan yang terjadi. Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya BPBD Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab besar dalam kegiatan pencegahan bencana mulai dari kegiatan pencegahan seperti ini bisa dijadikan sebagai lembaga yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penanggulangan kekeringan yang terjadi di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Karena melalui tahap ini diharapkan masyarakat khususnya di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bisa mendapatkan informasi yang diharapkan terkait bagaimana cara menghadapi kekeringan, dan seharusnya BPBD lebih memerhatikan kinerja daripada sumber daya manusianya agar tidak ada lagi hambatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mengalami kekeringan.

2. Peringatan (*warning*) : fase ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, agar individu dapat mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan respon yang efektif. Berikut pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan :

a) Bagaimana cara BPBD merespon setiap keluhan masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih?

Maka jawaban dari informan adalah :

Informan 1 :

“Masyarakat yang mengalami kekeringan, dan meminta bantuan air bersih biasanya berkoordinasi langsung ke kelurahan, kemudian kelurahan menghubungi BPBD, dan BPBD mendata wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan tersebut” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 2 :

“Sesuai prosedur yang sudah ada, BPBD mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan setelah menerima laporan dan mendata semua wilayah yang mengalami kekeringan dan wilayah yang meminta bantuan air” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 3 :

“Didalam merespon masyarakat, BPBD biasanya mendata wilayah-wilayah yang sudah melapor terlebih dahulu, kemudian BPBD sesegera mungkin

mengirim/mendistribusikan air ke wilayah tersebut” (Wawancara 2 Mei 2015)

Analisis Penulis :

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD merespon keluhan masyarakat yang membutuhkan air melalui pihak kelurahan, sehingga masyarakat yang membutuhkan air bersih berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kemudian BPBD mendata dan mendistribusikan air ke wilayah yang mengalami kekeringan. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur, sangat membantu pihak BPBD maupun pihak masyarakat tanpa terkecuali. Dengan adanya kemudahan masyarakat untuk mengurangi dampak dari krisis air pada saat kemarau atau kekeringan, masyarakat juga bisa mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan respon yang efektif. Di dalam tahapan ini juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, jawaban dari informan formal dan informan pendukung sangat *sinkron* dapat dilihat bahwa BPBD Kota Bandar Lampung sudah melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat yang mengalami bencana kekeringan dengan baik dan benar, dalam merespon setiap keluhan dari masyarakat, serta pengambilan tindakan setelah mendapatkan laporan yang sangat diperlukan untuk mengurangi resiko krisis air bersih.

b) Apakah BPBD sudah melakukan pelayanan pada waktu yang tepat?

Informan 1 :

“BPBD sebisa mungkin memberikan pelayanan pada waktu yang tepat, sesegera mungkin mengirim/mendistribusikan air ke wilayah tersebut”
(Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 2 :

“Menurut saya BPBD berusaha membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan secepat mungkin, akan tetapi tentu saja dalam melakukan pelayanan pasti mengalami kendala misalnya sarana dan prasarana yang terbatas, seperti mobil pensuplay air jujur kami masih dibantu dari pusat (BNPB)” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 3 :

“Secepat dan sesegera mungkin BPBD memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih, pembuatan sumur bor dan kegiatan penanggulangan bencana lainnya”

Analisis Penulis :

Menurut hasil wawancara, BPBD melakukan pelayanan secepat mungkin ketika warga mengalami kekeringan, namun BPBD memiliki kendala dalam melakukan pelayanan karena fasilitas yang kurang memadai, seperti kendaraan yang masih dibantu oleh BNPB/Pusat, karena BPBD Kota Bandar Lampung masih tergolong lembaga yang baru, sehingga sarana dan finansialpun masih terbilang kurang

terutama masalah kendaraan. Karena dalam memberi pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan ini juga penting karena semua rangkaian kegiatan didalamnya memiliki hubungan atau kolerasi bagi kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan. Dengan adanya kegiatan ini maka secara tidak langsung akan meminimalisir, mengurangi, dan memperkecil dampak atau akibat suatu bencana, karena kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, sehingga warga tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli air bersih, atau meminta kepada tetangga. Mengacu dalam UN/ISDR (2002) dalam fase ini, peran BPBD Kota Bandar Lampung adalah sebagai lembaga yang terpercaya untuk memberikan informasi dan melayani masyarakat agar masyarakat mampu mengurangi resiko dari bencana kekeringan dan mempersiapkan respon yang efektif dari bencana kekeringan tersebut. Kemudian salah satu dari langkah strategi ini dapat mempermudah BPBD dalam merealisasikan kegiatan strategi yang berikutnya. Dengan adanya keselarasan antara hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa BPBD sudah berusaha menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dari kekeringan yang terjadi, walaupun BPBD masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat (BNPB).

3. Bantuan darurat (*emergency relief*) : pemberian bantuan atau pertolongan selama atau segera setelah bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan yang mendasar orang-orang yang terkena. Hal ini dapat langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang. Berikut pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan :

- a) Bagaimana cara BPBD memberikan bantuan dalam menanggulangi kekeringan?
- b) Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- c) Siapa sajakah sasaran BPBD saat ini dan apa harapan BPBD dimasa yang akan datang?

Maka jawaban dari informan adalah :

Informan 1 :

“Biasanya BPBD mengadakan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan, kemudian BPBD mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Sasaran BPBD yang paling mendasar adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah rawan kekeringan. Setelah melakukan peninjauan langsung ke wilayah, harapannya ialah masyarakat tidak lagi krisis akan air bersih serta terciptanya koordinasi yang sepadan dengan pihak/instansi terkait sehingga penanggulangan kekeringan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 2 :

“Cara kami memberikan bantuan kepada masyarakat adalah dengan mengadakan peninjauan ke wilayah yang memang sangat mengalami

kekeringan, dan kami coba memberikan bantuan dengan mendistribusikan air ke wilayah tersebut. Tentu saja sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan kekeringan. Harapannya masyarakat tidak lagi susah untuk mendapatkan air bersih” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 3 :

“BPBD meninjau langsung lokasi yang mengalami kekeringan, kemudian BPBD mendistribusikan air ke wilayah tersebut, apabila diperlukan pembuatan sumur bor maka BPBD akan menyusun rapat koordinasi terlebih dahulu. Sasaran dari hasil kegiatan ini tentunya masyarakat, harapannya adalah masyarakat dapat tertolong dengan adanya kegiatan pembagian air bersih dan pembuatan sumur bor ini sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya” (Wawancara 2 Mei 2015)

Analisis Penulis :

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD memberikan bantuan ke wilayah yang mengalami kekeringan dengan cara meninjau langsung ke lokasi, kemudian BPBD membagikan air bersih ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan masing-masing wilayah. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan kekeringan. Harapannya masyarakat tidak lagi susah untuk mendapatkan air bersih, dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air bersih. Pemberian bantuan atau pertolongan setelah bencana terjadi dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan yang mendasar

masyarakat yang mengalami kekeringan, masyarakat yang mengalami krisis akan air bersih, hal tersebut bisa langsung jangka panjang atau jangka pendek. Salah satu kegiatan dari strategi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan BPBD memberikan bantuan jangka panjang dan jangka pendek, BPBD bisa meminimalisir kerugian atau kemungkinan terburuk yang terjadi saat bencana kekeringan terjadi di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Pihak BPBD juga mengungkapkan bahwa tindakan penanggulangan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan kondisi daerah masing-masing, BPBD mencontohkan untuk daerah yang memiliki sumber air dalam tanah, penanganan yang dilakukan yakni pembuatan pompa air. Sedangkan pada daerah yang memiliki sumber air cukup jauh, akan dibangun sumur biopori dan suplai air bersih langsung menggunakan kendaraan tanki yang masih dibantu oleh BNPB. Berdasarkan hasil observasi lapangan, menunjukkan bahwa memang jumlah kendaraan mobil tanki berikut kelengkapannya masih minim sekali, sehingga wajar saja apabila BPBD masih dibantu dengan BNPB. Karena dalam hal ini, BPBD dan BNPB merupakan unsur pelaksana badan penanggulangan yang menyelesaikan urusan bencana yang terjadi di daerahnya. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa meminimalisir dampak dari kekeringan.

4. Rehabilitasi (*rehabilitation*) : fase ini mencakup keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. Berikut pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan :

- a) Apakah BPBD sudah memfasilitasi masyarakat untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan setelah bencana kekeringan terjadi?
- b) Seperti apakah fasilitas yang diberikan BPBD pada masyarakat yang mengalami kekeringan?

Maka jawaban dari informan adalah :

Informan 1 :

“Dalam memfasilitasi masyarakat yang mengalami kekeringan, BPBD sudah mendistribusikan air bersih, kemudian BPBD membuat sumur bor titik-titik rawan kekeringan dengan mengoordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat termasuk pihak kelurahan” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 2 :

“Biasanya BPBD mengadakan rapat internal guna mengadakan konsultasi pada masing-masing bidang yang mengacu pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) BPBD Kota Bandar Lampung, selanjutnya BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan bencana guna memasang sumur bor ke wilayah yang mengalami kekeringan,

jadwal pemasangannya, siapa saja pihak yang ikut terlibat, serta pemilihan tempat dan anggaran dana yang akan dikeluarkan” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 3 :

“Seperti yang sudah saya utarakan, BPBD memfasilitasi masyarakat yang mengalami kekeringan dengan cara mendistribusikan air guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, namun dalam pelaksanaannya memang kami masih dibantu dari pusat (BNPB) karena kurangnya fasilitas yang memadai seperti mobil armada penyuplay air” (Wawancara 2 Mei 2015)

Analisis Penulis :

Menurut hasil wawancara dengan informan, BPBD sudah memfasilitasi masyarakat yang mengalami kekeringan, mencakup pemulihan kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan, misalnya mengurangi resiko kekeringan dengan mendistribusikan air bersih dan memasang sumur bor ke titik-titik yang mengalami kekeringan sangat parah. Namun karena kurangnya fasilitas yang memadai, BPBD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatannya masih dibantu dari pusat (BNPB) karena BPBD Kota Bandar Lampung masih terbilang lembaga yang baru. Sebenarnya anggaran dana dan sarana masih terbilang belum cukup memadai, tetapi setidaknya anggaran tersebut sudah cukup mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung. Untuk masalah finansial dan sarana pelaksanaan kegiatan memang BPBD masih dibantu oleh pemerintah pusat (BNPB) dan pemerintah daerah (APBD). Semua keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana

dengan tujuan memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana sangat membantu bagi masyarakat di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan hasil penelitian salah satu kegiatan dari strategi ini yang terpenting adalah pembuatan sumur biopori untuk mengantisipasi masyarakat dalam mengurangi dampak dari kekeringan, kemudian pembuatan sumur biopori berjalan dengan melibatkan pemerintah setempat. Warga di Kecamatan Sukabumi setiap hendak mengurus administrasi kependudukan, mereka harus memenuhi syarat pembuatan lubang biopori, minimal lima titik di sekeliling rumahnya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa belum semua tempat di kelurahan membuat sumur resapan air/lubang biopori ini, penyebabnya adalah program sumur biopori ini memang masih terbilang baru sehingga belum seluruh masyarakat di setiap kelurahan mengetahui. Penyebab lain, minimnya ketersediaan air itu, karena resapan air sudah dijadikan bangunan-bangunan, hingga ketika hujan turun, air itu tidak teresap tanah dan untuk mengatasinya, saat ini hanya ada satu solusi yakni membuat satu aturan untuk manajemen pemanfaatan airnya. Dan peran BPBD Kota Bandar Lampung dalam menyusun strategi di dalam fase ini sangat memengaruhi, mengacu pada UN/ISDR (2002) rehabilitasi ini mencakup semua kepentingan dan tindakan setelah bencana yang dilakukan oleh BPBD dengan tujuan memulihkan kondisi masyarakat Kecamatan Sukabumi yang mengalami kekeringan, kemudian mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan oleh masyarakat Kecamatan Sukabumi untuk mengurangi resiko bencana kekeringan yang terjadi.

5. Rekonstruksi (*reconstruction*) : fase ini mencakup semua kegiatan yang penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan :

- a) Bagaimanakah strategi BPBD dalam menanggulangi kekeringan dalam jangka panjang?
- b) Apa sajakah program bantuan dari BPBD untuk masyarakat yang mengalami kekeringan?
- c) Adakah hambatan yang dialami BPBD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan strategi tersebut? Jelaskan!

Maka jawaban dari informan adalah :

Informan 1 :

“Strategi yang dilakukan BPBD dalam menanggulangi kekeringan adalah yang pertama, mengonsultasikan permasalahan kekeringan tersebut pada masing-masing bidang yang mengcau kepada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) BPBD Kota Bandar Lampung, yang didasarkan pada kebutuhan dan situasi itu agar efektif dan efisien dalam penerapannya. Setelah mengonsultasikan permasalahan tersebut, kami mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan kekeringan, seperti BPPLH, PDAM serta pihak terkait lainnya, disini diputuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam menanggulangi kekeringan, kurang lebih seperti itulah

strategi dari BPBD. Hambatan yang dialami BPBD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan strategi tersebut adalah anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu perubahan personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah, sehingga perlunya penyesuaian kerja kembali apabila terjadi perubahan personal atau bidang kerja. Program bantuan dari BPBD sendiri tidak banyak, dikarenakan keterbatasan-keterbatasan tersebutlah yang menyebabkan BPBD belum bisa menjangkau semua masyarakat yang mengalami kekeringan” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 2 :

“Strategi BPBD menanggulangi kekeringan dalam jangka panjang biasanya kami memberikan sosialisasi kepada wilayah yang rawan kekeringan, misalnya dengan menyosialisasikan untuk membuat sumur resapan air/biopori di rumah tinggal masing-masing, serta memberikan masukan kepada warga untuk pandai menggunakan air. Untuk program dari BPBD sendiri, kami hanya mendistribusikan air dan membuat sumur bor, jadi sarana dan finansial pun masih terbilang kurang terutama masalah kendaraan, sehingga masih membutuhkan aliran bantuan dari pusat atau BNPB dan pemerintah kota melalui APBD. Tentu dalam menjalankan suatu rencana kegiatan pasti mengalami kendala atau hambatan. Hambatan yang kami alami itu adalah dana, sarana dan prasarana yang terbatas, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas” (Wawancara 2 Mei 2015)

Informan 3 :

“Kiat-kiat yang dilakukan BPBD dalam menyusun strategi penanggulangan kekeringan, BPBD membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan mengadakan distribusi air ke wilayah tersebut, dan sudah seharusnya wilayah yang mengalami kekeringan segera melapor apabila mengalami krisis air bersih dan membutuhkan bantuan dari BPBD sehingga masyarakat tidak lagi mengalami krisis air bersih, apabila wilayah sudah di distribusikan air kemudian wilayah tersebut masih mengalami kekeringan, kami membantu dengan pemasangan sumur bor ke wilayah tersebut dengan melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terlebih dahulu. Hambatan yang dialami BPBD sendiri dalam menanggulangi bencana adalah personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah, sehingga perlunya penyesuaian kerja kembali apabila terjadi perubahan personel atau bidang kerja. Selain itu anggaran yang bisa dikatakan kurang, jujur kami masih memperoleh bantuan dari pemerintah pusat (BNPB) dan pemerintah daerah (APBD)” (Wawancara 2 Mei 2015)

Analisis Penulis :

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi BPBD Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kekeringan yang pertama mengonsultasikan permasalahan kekeringan tersebut pada masing-masing, kemudian BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan kekeringan, seperti BPPLH, PDAM serta pihak terkait lainnya, kemudian menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan

dilakukan dalam menanggulangi kekeringan, serta anggaran dana yang akan dikeluarkan. Hambatan yang dialami BPBD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan adalah anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, harapan BPBD dimasa yang akan datang dengan dilaksanakannya kegiatan strategi tersebut adalah terwujudnya lingkungan yang bebas ancaman kekeringan, yang didukung oleh adanya sistem informasi kesiagaan dan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat melalui strategi penanggulangan kekeringan, serta terciptanya koordinasi yang baik dan sepadam dengan pihak atau instansi terkait sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan standarnya, selain itu perubahan personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah.

Di dalam fase ini mencakup semua kegiatan penting yang dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat oleh pihak BPBD, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa strategi yang akan dijalankan oleh BPBD Kota Bandar Lampung adalah pembuatan sumur biopori dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manajemen pemanfaatan air di setiap rumah tinggalnya masing-masing, hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan sumur bor dan sarana lainnya akan dilimpahkan kepada warga setempat, baik dengan pembentukan Badan Usaha Mlik Dsa (BUMDES) atau dengan model lainnya.

C. Pembahasan

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung adalah salah satu wilayah dari 13 titik yang diprediksi akan mengalami krisis air bersih yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung pada saat musim kemarau. Intensitas kekeringan yang terjadi di Kecamatan Sukabumi dapat dikategorikan wilayah kering karena curah hujan 70-80% dibawah kondisi normal. Kecamatan Sukabumi sendiri akan memasuki musim peralihan dengan intensitas hujan menurun pada Mei sampai Juli. Sedangkan pada Agustus sampai Desember, diperkirakan terjadi kemarau.

BPBD juga mengungkapkan bahwa tindakan penanggulangan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan kondisi daerah masing-masing. BPBD mencontohkan, untuk daerah yang memiliki sumber air dalam tanah, penanganan yang dilakukan yakni pembuatan sumur bor. Sedangkan pada daerah yang memiliki sumber air cukup jauh, akan dibuat sumur biopori dan suplai air bersih langsung menggunakan kendaraan tanki. Prediksi sejumlah daerah yang berpotensi kekeringan ditengarai diperoleh dari hasil penelusuran BPBD Kota Bandar Lampung saat melakukan peninjauan di lapangan serta laporan dari setiap kecamatan.

Rencana strategi BPBD Kota Bandar Lampung adalah keterampilan pihak BPBD dalam menanggulangi bencana kepada masyarakat. Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti, rencana strategi yang dilakukan adalah berupa kegiatan

pengeboran ke daerah atau titik wilayah kekeringan, sosialisasi kepada masyarakat untuk membuat sumur biopori di rumah tinggal masing-masing dan membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan mengadakan distribusi air ke wilayah yang mengalami kekeringan.

Biopori ini adalah pengambilan air tanah yang tidak diimbangi dengan semangat konservasi, yaitu dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah akan berakibat pada berkurangnya ketersediaan air tanah. Pada daerah yang baru terbangun, dengan mengubah *ground cover* dari bahan yang tidak ramah pada sumberdaya air, dari sawah atau tegalan menjadi permukiman dengan segala bentuk bahan perkerasan halamannya, membuat debit air larian meningkat drastis, sehingga masyarakat dalam pemenuhannya akan air bersih memanfaatkan keberadaan air tanah dengan membuat sumur dangkal. Tampak bahwa suatu lingkungan apabila ada perubahan kondisi permukaan tanahnya dari yang alami ke non-alami, pasti akan terjadi limpasan air larian (dari hujan) yang meningkat, mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau.

Di dalam pembahasan ini, peneliti mencoba menjabarkan rencana strategi yang dilakukan BPBD diatas mengacu pada UN/ISDR (2002). Maka deskripsi penelitian ini mencakup prediksi, peringatan, bantuan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana kekeringan tersebut.

1. Prediksi (*Prediction*)

Di dalam fase ini, dilakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural. Langkah struktural yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana alam, kerusakan lingkungan dan bencana teknologi. Sedangkan langkah non-struktural yaitu tindakan yang diambil pada saat awal terjadi bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk peringatan dini yang efektif dan tepat waktu, serta evakuasi sementara penduduk dan barang dari lokasi terancam bencana. Di dalam melaksanakan suatu kegiatan, terlebih dahulu harus memiliki suatu prediksi.

Prediksi merupakan perkiraan, prediksi cuaca selalu berdasarkan data dan informasi terbaru yang didasarkan pengamatan. Menurut informan, langkah pertama yang dilakukan BPBD Kota Bandar Lampung adalah pemberian peringatan dini dalam menghadapi kekeringan, serta kiat-kiat yang dilakukan apabila menghadapi kekeringan. Untuk Kecamatan Sukabumi sendiri, daerah rawan bencana kekeringan itu seperti Kelurahan Sukabumi, Sukabumi Indah, Nusantara Permai, Campang Raya dan Campang Jaya.

2. Peringatan (*Warning*)

Langkah selanjutnya adalah peringatan (*warning*), fase ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang

terpercaya, agar individu dapat mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan respon yang efektif.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi adalah ketersediaan dana dan fasilitas yang dimiliki lembaga. Pertimbangan dana memang dalam banyak hal menjadi yang paling utama, karena suatu kegiatan, bagaimanapun juga pasti membutuhkan biaya tertentu. Demikian pula fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program prediksi. Maksudnya, dalam hal ini adalah kemudahan-kemudahan dan perangkat sistem yang diperlukan untuk kegiatan yang dimaksud. Pelaksanaan strategi BPBD Kota Bandar Lampung tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan fasilitas, media dan anggaran dana yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya BPBD masih mengandalkan bantuan dari :

- A. Pemerintah Pusat, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) aliran dana dan sarana fasilitas tersebut disalurkan langsung ke BPBD Kota Bandar Lampung. Biasanya anggaran dana ini dipakai dalam pembiayaan rapat koordinasi antara BPBD Kota Bandar Lampung dan satuan kerja terkait dalam perumusan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana kekeringan.
- B. Pemerintah Daerah, yaitu melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung dan sumber anggaran lainnya seperti uang kas BPBD Kota Bandar Lampung. Anggaran dana ini digunakan dalam

pembiayaan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana kekeringan di tingkat kota.

Sedangkan untuk anggaran biaya yang dibutuhkan BPBD Kabupaten/Provinsi dalam kegiatannya di daerahnya, masing-masing dibebankan oleh APBD Kabupaten/Provinsi itu sendiri. Artinya BPBD Kota Bandar Lampung tidak bertanggungjawab atas pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Provinsi.

3. Bantuan Darurat (*Emergency Relief*)

Langkah selanjutnya adalah bantuan darurat dalam melaksanakan rencana strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam fase ini, pemberian bantuan atau pertolongan selama atau segera setelah bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan yang mendasar orang-orang yang terkena. Hal ini dapat langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Pelaksanaan kegiatan ini, BPBD mengadakan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan, kemudian BPBD mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi semua pihak tidak terkecuali masyarakat, karena melalui kegiatan ini masyarakat bisa meminimalisir atau mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana kekeringan. Karena di dalam mengatasi bencana kekeringan yang terus-menerus seperti ini, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk bertanggungjawab dalam menanggulanginya, akan tetapi faktor dari masyarakat juga.

Peninjauan lokasi yang dilakukan BPBD Kota Bandar Lampung itu sifatnya hanya sebagai pengkoordinasian, artinya BPBD Kota Bandar Lampung hanya bertugas sebagai koordinator yang mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini sampai akhirnya ke masyarakat merupakan tanggungjawab dari BPBD Kota Bandar Lampung hal ini karena program kegiatan di masing-masing Kota/Provinsi/Kabupaten berbeda, tergantung kebijakan masing-masing BPBD Kota/Provinsi/Kabupaten tersebut. Selain itu, karena setiap daerah mempunyai karakteristik ancaman dan resiko yang berbeda-beda, sehingga perlu disusun suatu rencana di tingkat wilayah/daerah masing-masing agar penanggulangan bencana dapat dilakukan lebih efektif dan lebih terarah.

4. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Langkah selanjutnya adalah rehabilitasi. Fase ini mencakup keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, BPBD mengadakan rapat internal guna mengadakan konsultasi pada masing-masing bidang yang mengacu pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) BPBD Kota Bandar Lampung, selanjutnya BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan bencana guna memasang sumur bor ke wilayah yang mengalami kekeringan, jadwal pemasangannya, siapa saja pihak yang ikut terlibat, serta

pemilihan tempat dan anggaran dana yang akan dikeluarkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan nya BPBD Kota Bandar Lampung sendiri masih dibantu oleh BNPB seperti bantuan mobil suplay air.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, BPBD Kota Bandar Lampung hanya bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan kota saja. Artinya untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya atau kegiatan di kabupaten/provinsi telah menjadi tanggungjawab dari BPBD masing-masing kabupaten/provinsi.

Hubungan kerja antara BPBD Kota dengan BPBD Kabupaten/Provinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Kota cepat melaksanakan komando, koordinasi, dan pelaksana (Pasal 30, PP No 46 Tahun 2008).

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung terdiri atas 2 klasifikasi, yaitu klasifikasi A dan klasifikasi B. Klasifikasi A terdiri atas: Kepala Pelaksana, Sekretariat Unsur Pelaksana, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sedangkan klasifikasi B terdiri atas: Kepala Pelaksana, Sekretariat Unsur Pelaksana, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

5. Rekonstruksi (*Reconstruction*)

Langkah terakhir dalam mengidentifikasi rencana strategi BPBD Kota Bandar Lampung adalah rekonstruksi atau evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan, fase ini mencakup semua kegiatan yang penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan utama fungsi dari evaluasi ini adalah agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Evaluasi ini merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setelah itu dapat ditentukan, apakah strategi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana strategi yang direalisasikan adalah :

1. Mitigasi dan Kesiapsiagaan (*mitigation and preparedness*)

Dapat di lihat dari hasil observasi dan penelitian, tindakan yang diambil oleh BPBD Kota Bandar Lampung mengacu pada kegiatan mitigasi, yaitu pengurangan resiko bencana kekeringan melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung. Misalnya, pembuatan sumur bor, penyediaan air bersih di rumah tinggal warga, pembagian air bersih dan pembuatan sumur

biopori di rumah tinggal warga. Dalam hal ini BPBD memanfaatkan berbagai peralatan dan wewenang yang dimilikinya dalam banyak cara untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kekeringan khususnya di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

2. Tanggapan (*Response*)

Kedua, kegiatan dari strategi yang di realisasikan oleh BPBD Kota Bandar Lampung mengacu pada tanggap darurat, dimana BPBD melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana kekeringan untuk menangani dampak yang ditimbulkan, misalnya seperti cepat tanggap dalam melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mencukupi kebutuhan dasar serta pemberian sarana dan prasarana ke masyarakat yang mengalami kekeringan.

3. Pemulihan (*recovery*)

Ketiga, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung mengacu pada pemulihan (*recovery*) dimana berbagai upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung untuk menanggulangi dan mengurangi dampak akibat kekeringan di setiap kelurahan yang berada di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kota Bandar Lampung disusun sesuai tahapan nya agar berjalan dengan baik dan terarah. Misalnya rencana umum dan menyeluruh

yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan khususnya tentang kekeringan.

Masalah atau hambatan yang dialami BPBD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kekeringan adalah :

1. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Rendahnya kualitas SDM dibidang penanggulangan bencana yang dimiliki, hal ini terlihat dari kurangnya orang atau pegawai BPBD Kota Bandar Lampung yang terampil dalam proses sosialisasi penanggulangan kekeringan. Latar belakang pendidikan akan sangat memengaruhi kinerja individu, rata-rata sumber daya manusia di BPBD Kota Bandar Lampung bukan berlatar belakang pada pendidikan geologi atau geografi yang lebih menyangkut pada kegiatan penanggulangan bencana, tetapi justru berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti: Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknik. Dari data yang terurai di atas, secara keseluruhan ternyata dapat banyak kekurangan tenaga kerja yang berdasarkan latar pendidikan, sehingga menyebabkan kurangnya tenaga yang berkualitas di bidang penanggulangan bencana.

2. Terbatasnya Anggaran dan Fasilitas

Terbatasnya anggaran dan fasilitas dalam menjalankan suatu rencana kegiatan strategi di bidang penanggulangan kekeringan, karena tentunya dibutuhkan anggaran dan fasilitas yang memadai, akan tetapi dalam kenyataannya anggaran dana dan fasilitas di BPBD Kota Bandar Lampung masih terbilang kurang, sehingga BPBD Kota Bandar Lampung masih membutuhkan bantuan dari pusat yaitu BNPB, sedangkan anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan

penanggulangan kekeringan di tingkat kabupaten/provinsi telah menjadi tanggungjawab masing-masing kabupaten/provinsi.

Tabel 3. Rencana Strategi BPBD Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kekeringan

No	Indikator	Rencana Kegiatan	Hambatan/Dukungan
1	Prediksi (<i>prediction</i>)	A. Pemberian peringatan dini	Hambatan : kurangnya pengetahuan petugas BPBD dalam memberikan informasi/peringatan dini
		B. Pemberian informasi	Hambatan : kurangnya pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kekeringan
2	Peringatan (<i>warning</i>)	A. Identifikasi daerah potensi rawan bencana	Dukungan : penyediaan jasa komunikasi
3	Bantuan Darurat (<i>emergency relief</i>)	A. Gladi lapangan penanggulangan bencana	Dukungan : penyediaan kendaraan dinas/operasional
		B. Penyusunan SPB (standar prosedur bencana)	Dukungan : penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Rehabilitasi (<i>rehabilitation</i>)	A. Pemulihan kondisi kehidupan setelah bencana	Hambatan : kurangnya fasilitas yang memadai seperti mobil operasional/armada pensuplay air
		B. Pemberian fasilitas	Dukungan : penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5	Rekonstruksi (<i>reconstruction</i>)	A. Monitoring dan evaluasi pascabencana	Hambatan : anggaran dana yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas
		B. Manajemen pascabencana	Dukungan : penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik